

PATMAWATI &
BESSE WAHIDA



KONSEP KETAUHIDAN

DALAM NASKAH KUNO
LONTARA ATTORIOLOANG
RI WAJO



Editor:
Dwi Surya Atmaja

Patmawati dan Besse Wahida

**KONSEP KETAUHIDAN
DALAM NASKAH KUNO *LONTARA*
*ATTORIOLOANG RI WAJO***

Editor:
Dwi Surya Atmaja



**KONSEP KETAUHDAN
DALAM NASKAH KUNO *LONTARA ATTORIOLOANG RI WAJO***

All rights reserved
@ 2018, Indonesia: Pontianak

ISBN:
978-602-5510-40-3

**Penulis:
Patmawati dan Besse Wahida**

**Editor:
Dwi Surya Atmaja**

**Lay Out
Fahmi Ichwan dan Adi Santoso**

Diterbitkan oleh IAIN Pontianak Press
Jalan Letjend. Suprpto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat

viii + 224 page 16 x 24 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga tulisan ini dapat selesai dan diterbitkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Selanjutnya, trimakasih banyak kami haturkan kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu atas segala bantuannya mulai dari pelaksanaan penelitian hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala dan kebaikan yang berlipat, amin.

Buku ini merupakan hasil penelitian studi naskah/filologi yang mengkaji naskah kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang didanai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenag RI.

Buku ini diharapkan memberikan kontribusi, manfaat dan informasi dari terungkapnya isi naskah kuno *Lontara*

Attorioloang ri Wajo yang meliputi persoalan konsep ketauhidan yang menandakan bahwa pemikiran masyarakat Bugis Wajo pada abad XV sudah sampai pada tataran tentang Tuhan Yang Esa, sehingga dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik kepada semua makhluk sebagai ciptaan Tuhan yang Tunggal dalam bentuk jujur kepada tuhan dan makhluk-Nya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Atas saran dan kritikan yang diberikan, kami haturkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

BAB II

DESKRIPSI NASKAH KUNO *LONTARA*

<i>ATTORIOLOANG RI WAJO</i>	9
A. Sejarah Kedatangan Orang Bugis di Kalimantan Barat	9
B. Bahasa dan Aksara Bugis di Kalimantan Barat	34
C. Naskah –naskah Bugis di Kalimantan Barat	44
D. Sekilas tentang Naskah <i>Lontara Attorioloang ri Wajo</i>	50
E. Ringkasan Isi Naskah	52

BAB III

KETAUHUDAN	65
A. Sejarah Manusia Bertuhan	65
B. Pengertian Tauhid	68
C. Pembagian Tauhid	71
1. Tauhid <i>Uluhiyah</i>	71
2. Tauhid <i>Rububiyah</i>	73
3. Tauhid <i>Al-asma' wa al-Sifat</i>	76

BAB IV

EDISI TEKS DAN TERJEMAHAN	81
A. Penjelasan Khusus Edisi Teks	81
B. Pertanggungjawaban	82
C. Traskrip dan Terjemahan	85

BAB V

KETAUHIDAN DALAM NASKAH KUNOLONTARA

ATTORIOLOANG RI WAJO153

 A. Tauhid *Uluhiyah* dalam Naskah Kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo*153

 B. Tauhid *Uluhiyah* dalam Naskah Kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo*178

DAFTAR PUSTAKA201

BAB I

PENDAHULUAN

Naskah adalah sebuah produk masa lalu yang dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kondisi masa lalu. Naskah dalam konsep manuskrip biasanya ditulis di atas lembaran-lembaran daun lontar dengan menggunakan aksara dan bahasa daerah. Dengan demikian naskah berurusan dengan media, bahasa, dan aksara yang khas dan tradisional serta berusia sangat tua. Keberadaan sebuah naskah jelas berhubungan dengan sebuah proses pendokumentasian masa lalu. Dari sebuah naskah maka akan didapatkan sebuah informasi baik dari sisi bahasa yang dipakai ataupun isi ceritanya (Arsanti, 2015: 25).

Bangsa Indonesia memiliki banyak naskah kuno yang sarat dengan nuansa keagamaan dan kebijakan lokal (*local wisdom*). Naskah Bugis kuno misalnya, adalah sebagai salah satu sumber sejarah, peninggalan masa lalu dalam bentuk dokumen yang merekam segala aspek kehidupan masyarakat Bugis, baik jasmaniah maupun rohaniah dalam berbagai bentuk. Kebanyakan karya-karya tersebut berisi tentang nilai-nilai budaya, politik, *pappaseng* (pesan-pesan), keagamaan dan memuat berbagai bentuk tradisi masyarakat Bugis pada masa

lampau. Termasuk naskah kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* ini.

Naskah *Lontara Attorioloang ri Wajo* merupakan naskah yang ditemukan oleh tim pengumpul naskah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, pada seorang keturunan Bugis yang bernama Mul'am, tinggal di wilayah Sambas.

Kondisi naskah ini sudah dalam keadaan tidak utuh, beberapa bagian di awal dan di tengah sudah ada yang hilang, dan bagian pinggir lembaran naskah sudah buram dan tak mampu lagi dibaca yang mengakibatkan kurang bersambungannya cerita dan kurang utuhnya informasi dari beberapa peristiwa. Dalam naskah diceritakan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan Wajo, mulai dari sejarah kerajaan Wajo, dialog mengenai ketauhidan, penggantian raja, hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan kerajaan lainnya seperti kerajaan Gowa, Bone dan Luwu, peristiwa perkawinan di antara keluarga raja, migrasi, dan *paseng*.

Naskah *Lontara Attorioloang ri Wajo* menandakan bahwa Sulawesi Selatan menyimpan tradisi penulisan naskah yang kaya. Naskah ini ditulis dalam aksara lontara yang berbahasa Bugis. Awalnya tulisan Bugis di daun *lontara* (sejenis palem), dan ini telah menjadi istilah yang digunakan kebanyakan naskah dari wilayah ini, terlepas dari jenis media yang mereka gunakan dalam menulis.

Selanjutnya, di Sulawesi Selatan juga terdapat tradisi menulis catatan harian, termasuk *Lontara Attorioloang ri Wajo*. Tradisi menulis ini biasanya dilakukan di kalangan istana, oleh penguasa sendiri atau pejabat istana. *Lontara Attorioloang ri Wajo* tidak memuat masalah pribadi melainkan mencatat kejadian-kejadian sosial yang penting. Di Sulawesi Selatan catatan harian mulai ditulis sejak sekitar awal abad ke XVII. Menurut Noorduyn, dikutip oleh Helen Ceperkovic dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (2005: 96), paling tidak catatan paling awal tidak ditulis sebelum masa itu (awal abad ke XVII). Meski catatan harian digunakan di banyak budaya di seluruh dunia, hal ini tidak terjadi di dunia Melayu pada masa itu.

Dengan demikian, tradisi catatan harian istana termasuk *Lontara Attorioloangri Wajo* menggunakan aksara dan bahasa daerah serta menulis kejadian-kejadian sosial di kerajaan Wajo. Menurut peneliti, naskah ini ditulis di Wajo pada abad ke XVII, keberadaannya di Kalimantan Barat (Sambas) dibawa oleh orang-orang yang melakukan migrasi, dalam tulisan Patmawati (2014: 2) yang berjudul “Migrasi Orang Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI (Analisis Kritis Sejarah Sosial dan Kultur)” mengatakan bahwa orang Bugis banyak yang melakukan migrasi ke Kalimantan Barat setelah terjadinya Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Para imigran ini banyak dari kalangan istana bersama para *jua-juanya* (pengikut), kemungkinan mereka bermigrasi sambil membawa lontara

masing-masing, karena pemegang lontara menandakan salah satu bukti bahwa mereka adalah keturunan Kerajaan Wajo.

Migrasi selanjutnya dari Wajo ke Pontianak terjadi pada abad XX. Hal ini diungkapkan oleh Andi Ima Kesuma (2004:77), migrasi besar-besaran dari Wajo ke Pontianak pada tahun 1931-1932. Migrasi ini dilakukan oleh keluarga besar Petta La Bakko Daeng Macora, dua dari tiga putranya, yakni La Makkuraseng dan La Tenribali melakukan migrasi ke Pontianak bersama anak isterinya diikuti sebagian besar *jua-juanya*.

Orang Bugis selalu memperlihatkan kecintaan terhadap tradisi, yang tidak saja dipelihara lewat tradisi lisan, tapi juga tercatat, Christian Pelras (2005: 41-49) mengatakan bahwa mungkin sejak abad ke-14 orang Bugis sudah mulai menulis, dalam berjilid-jilid naskah tulisan tangan (lontara), yang disimpan banyak keluarga di hampir seluruh desa-desa orang Bugis di Sulawesi Selatan. Fakta ini menjadi saksi dan bukti meratanya, paling tidak sejak abad ke-18, tingkat keberaksaraan yang relatif tinggi bahkan di desa sekalipun. Meski lontara memegang peranan untuk mempertahankan tradisi ini, karena mencatat sejarah (dalam bahasa Bugis: *attorioloang* atau tentang orang-orang tua), hukum, kebiasaan, ritual dan pengetahuan tradisional tentang pertanian, perbintangan (astronomi), navigasi, pembuatan perahu dan rumah, dan sebagainya, juga kadang mencatat inovasi-inovasi. Teks-teks ini tidak hanya menyebut nama-nama penguasa ketika inovasi itu diperkenalkan, tapi juga menjadi alat untuk menyebarkan

inovasi yang dipinjam (dari tempat lain), yang kelak menjadi bagian tradisi, baik itu di bidang keagamaan maupun bidang teknis. Sebagai contoh, di abad ke-17, ditulis naskah-naskah tentang ajaran-ajaran ulama terkenal Sulawesi Selatan. Salah satu ulama legendaries yakni Muhammad Yusuf Al-Maqassari¹ dengan karyanya *Safinat Al-Najah* (Azyumardi Azra, 2004: 260) dan (M. Solihin, 2005: 287).

Kecintaan orang Bugis terhadap budaya tulis menulis sangat tinggi, hal ini dapat dilihat pada para perantau yang berasal dari Bugis, mereka membawa naskah-naskah mereka dalam bermigrasi (Patmawati, 2005: 114-115) dan (Hasanuddin dkk., 2000: 80). Peneliti menemukan beberapa naskah lontara di luar daerah Bugis, salah satunya di wilayah Kalimantan Barat,² naskah tersebut antara lain: *Lontara Attorioloang ri Wajo*,

¹Muhammad Yusuf bin Abd Allah Abu Al-Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Maqassari, di Sulawesi dikenal dengan sebutan “Tuanta Salamaka ri Gowa” (Guru Kami yang Agung dari Gowa), menurut sejarah Gowa, dilahirkan pada tahun 1036/1627. Silsilahnya terdapat dalam naskah *Lontara Bilang*, yang termasuk historiografi tertua di Kerajaan Gowa dan Tallo di Sulawesi Selatan. *Lontara Bilang* ditulis dalam bahasa Makassar dengan menggunakan penanggalan hijriah, dan secara umum dianggap dapat dipercaya oleh para ahli sejarah.

²Keberadaan orang Bugis di Kalimantan Barat dalam tiga tahap: *Pertama*, tahun 1667 di Sulawesi Selatan khususnya di kerajaan Gowa terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan pihak Belanda yang dipimpin C. Spelman, peperangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak kerajaan Gowa, sehingga terjadi Perjanjian Bungaya. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Bungaya pada tanggal 17 November 1667, pedagang-pedagang Bugis (*To Sugi*) bersama para pemberani (*To Warani*), para cendekiawan (*To Acca*), para ulama (*To Panrita*), dan para ahli dalam beberapa bidang (*To Sulasena*), menyebar di kepulauan Nusantara, salah satunya di Kalimantan Barat. *Kedua*, akhir tahun 1946-awal 1947, terjadi pembunuhan secara massal, akibat keganasan Kapten Westterling yang memakan korban 40.000. *Ketiga*, tahun 1950 pemberontakan DII/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.

naskah lontara bersama dengan tulisan Arab dalam halaman yang sama, naskah lontara yang berisi doa (Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, 2001: 52) dalam bahasa Arab dengan gambar bintang³ dan kompas, bacaan iqamat shalat dengan penjelasan bahasa Bugis (kalimat *hayya alal falah*) tidak ditulis dalam naskah ini. Naskah yang lengkap (1-3 jilid) adalah naskah Kitab Falaq karangan Sayyid Muhyiddin Al-Arabi yang ditulis pada tahun 1210 H diterjemahkan dalam bahasa Bugis. Naskah lontara yang ditulis oleh Sufu (Yusuf).

Keberadaan naskah kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* tidak terlepas dari unsur-unsur masyarakat Bugis yang melek literasi, sehingga apa yang dihasilkan dari karya ini merupakan sebuah reflika atau deskripsi dari keadaan masyarakat pada waktu itu, yang berupa ajaran moral, ketauhidan, politik, dan unsur lain yang bernilai luhur.

Salah satu hal yang menarik dikaji dalam naskah kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* yaitu mengenai konsep ketauhidan yang dianut oleh masyarakat bugis pada saat itu. Ketertarikan mengkaji konsep ketauhidan dalam naskah kuno *Lontara*

³Setiap sisi dari bintang tersebut terdapat nama khulafaurrasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Menurut Halide ini adalah *sulapa eppa'e* (pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Bunyi *sulapa eppa'e* adalah sebagai berikut:

Abu Bakkareng tettong riolo (Abu Bakar berdiri di depan)

Ummareng tettong di atau (Umar berdiri di sebelah kanan)

Bagenda Ali tettong ri abeo (Baginda Ali berdiri di sebelah kiri)

Usmang tettong ri munri (Usman berdiri di belakang)

Kun fayakun (Jadi maka jadilah)

Barakka la ilaha illa 'llah (Berkat Allah tiada Tuhan selain Allah)

Muhammadun rasulullah (Muhammad rasul Allah).

Attorioloang ri Wajo didasarkan dari observasi penulis terhadap seluruh isi naskah yang mana didalamnya terdapat kata *dewata seuwae* yang artinya Tuhan Yang Esa. Penggunaan kata tersebut hampir ditemukan di setiap percakapan antara sesama *arung*⁴ maupun antara *arung* dengan rakyatnya padahal syariat Islam belum masuk dan diterima oleh kalangan *arung* dan masyarakat bugis.

Adapun konsep ketauhidan yang akan digunakan untuk melihat teks dan konteks *dewata seuwae* dalam Naskah Kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* yaitu konsep tauhid *Uluhiyah* tauhid *Rububiyah*. Dengan demikian pengkajian terhadap naskah kuno perlu dilaksanakan dan dilestarikan termasuk kajian terhadap naskah kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo* ini, agar dapat diketahui dan dimengerti aspek-aspek atau nilai-nilai penting yang terkandung di dalam karya ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kegunaan karya tersebut benar-benar diketahui dan bermanfaat guna.

⁴ *Arung* yaitu para raja dan pejabat yang memimpin dan memerintah di daerah-daerah Bugis.

BAB II

Deskripsi Naskah Kuno *Lontara Attorioloang ri Wajo*

A. Sejarah Kedatangan Orang Bugis di Kalimantan Barat

Kata migrasi bermakna perpindahan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Konsep ini seterusnya boleh dilihat dari pada aspek yang berikut;

1. Migrasi dalam, yaitu perpindahan di dalam kawasan politik yang tertentu, biasanya sebuah negara.
2. Migrasi luar, yaitu perpindahan dari satu negara ke satu negara yang lain.
3. Migrasi yaitu perpindahan masuk ke dalam suatu kawasan atau negara, mereka yang berpindah dikenali sebagai imigran.
4. Emigrasi, yaitu perpindahan keluar dari sesuatu kawasan atau negara. Mereka yang berpindah dikenali sebagai emigran.
5. Migrasi sukarela, yaitu perpindahan mengikut kehendak hati tanpa dipaksa oleh orang lain atau keadaan.
6. Migrasi paksa, yaitu perpindahan politik dan diskriminasi ataupun faktor semula jadi seperti gempa bumi, letupan gunung berapi dan banjir (Norazit Selat, 1993: 96-97).

Melihat konsep di atas, maka perpindahan orang Bugis dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Barat, masuk dalam

konsep migrasi dalam karena masih dalam satu kawasan yaitu Negara Indonesia, mereka disebut sebagai imigran. Migrasi orang Bugis ada yang melakukan secara sukarela, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor formal (Pegawai Negeri Sipil), seperti penempatan guru-guru dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Barat pada tahun 70-an. Mereka ini ada yang tetap menetap di Kalimantan Barat, ada juga yang setelah mengabdikan puluhan tahun di Kalimantan Barat kembali ke Sulawesi Selatan. Migrasi paksa juga terjadi pada kelompok orang Bugis khususnya pada masalah politik (tak mau diperintah oleh penjajah Belanda). Pada akhir tahun 1670 penghancuran total tosarra dan perusakan sistematis di daerah pinggiran Wajo menambah pertumbuhan arus pengungsi meninggalkan Sulawesi Selatan. Perantauan orang Wajo segera setelah tahun 1670 skalanya ternyata lebih besar ketimbang arus pengungsi dari orang Makassar dan menyebabkan perubahan jumlah penduduk yang menyolok di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau tetangganya (Leonard Y Andaya, 2004: 261) di Kalimantan Barat sendiri terdapat wilayah yang diberi nama Wajo letaknya di Kabupaten Pontianak.

Meninggalkan Negeri untuk terbebas dari pemerintahan yang menindas atau tidak perhatian adalah ciri lazim di masyarakat Sulawesi Selatan hingga kini. Di masa lalu, seseorang mempunyai beberapa pilihan; mereka dapat pergi kekeluarga di komunitas tetangga dan menempatkan diri mereka dibawah penguasa tetangga itu, atau mereka dapat bergabung ke

dalam kelompok-kelompok “di luar hukum“, kelompok yang bertindak dalam sistem perilaku yang mereka ciptakan sendiri. Ada beberapa perbedaan tertentu dalam migrasi skala besar pada akhir abad ke-12. Mereka kebanyakan dipimpin oleh kalangan istana atau bangsawan tinggi, yang berarti pengikut mereka sering sangat banyak. Di Sulawesi Selatan, para pemuka selalu mengumpulkan pengikut dari kerabat, rakyat, budaknya, dan individu-individu lain yang terikat oleh hubungan “paktron klien“ (Leonard Y Andaya: 2004: 261).

Salah satu contoh pembesar kalangan istana yang meninggalkan wilayahnya, dapat dilihat dalam jejak Opu Daeng Manabung bersaudara. Opu Daeng Manabung yang bergelar pangeran Mas Surya Negara berasal dari Kerajaan Luwu. Anak dari Opu Daeng Tenri Borong ri La’ga Bin Lamadoe Salat atau La Maddusila (La Patiware Daeng Parabung alias Patiarase), ialah Raja Luwu yang pertama memeluk agama Islam yakni pada tahun 1603 (Ellyas Suryani bin Soren dkk., 2001: IX) .

Menurut JU Lontaan (1975: 136) Opu Daeng Manabung adalah seorang pelaut yang berani dan berhasil mengarungi lautan India. Dia meninggalkan Kota kelahirannya bersama saudara-saudaranya, yakni Opu Daeng Kemasi bergelar Pangeran Mangku Bumi⁵, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak bergelar yam di pertuang mahkota, Opu Daeng Marewa bergelar

⁵ Opu Daeng Kemasi Menikah Dengan Adik Uting Kemala Bergelar Ratu Adil yang Bernama Urai Tengah, Anak dari Pangeran Dipa (Bangsawan Landak) dan Raden Ratna Dewi (Putri Raden Sulaiman Bergelar Sultan Muhammad Syafeiuddin 1 Raja Sambas).

Yam Dipertuan Muda. Opu Daeng Manambung adalah anak ketiga dari lima bersaudara.

Mereka pertama kali berlayar menuju Banjarmasin, Johor, kemudian ke daerah Kerajaan Tanjungpura, selanjutnya ke kerajaan Mempawah. Kedatangan mereka ke Tanjungpura atas permintaan Sultan Muhammad Zainuddin. Sebab, pada saat itu, terjadi perebutan kekuasaan/kudeta yang dilakukan oleh Pangeran Agung (Adik Sultan Sendiri), yang selama ini merasa tidak puas dengan jabatannya sebagai pembantu kerajaan, ia sangat berambisi menjadi seorang raja. Dalam kudeta ini, ia dibantu oleh para pengawal istana yang tidak setia pada Sultan, terutama bantuan dari kedua menantunya yang berasal dari Bugis dan terkenal sangat sakti serta pandai perang. Keduanya adalah Daeng Matak suami Ratu Malaya dan Tuan Haji Hupas suami Utin Raya.

Kudeta terjadi pada tahun 1710 yang mengakibatkan Sultan mengungsi ke Banjarmasin, untuk memohon bantuan dari rakyat Sampit, Mandawai, dan kota Waringin setelah itu mereka mengadakan perlawanan, namun serangannya selalu mengalami kegagalan, bahkan Sultan sendiri tertangkap dan di tawang di Mesjid Agung Tanjungpura. Walaupun terpenjara, beliau masih sempat mengirim surat kepada Opu Daeng Manambung bersaudara di Johor, yang sedang membantu kerajaan Johor dari serangan Kerajaan Minangkabau.

Mereka menanggapi berita tersebut dan melaporkan kepada Raja Johor mengenai keberangkatan mereka ke

Tanjungpura. Raja pun menyetujui, bahkan Opu Daeng Manabung bersaudara, berangkat dengan mambawa pasukan. Setelah tiba di Tanjungpura, mereka menemui Pangeran Agung untuk meminta penjelasan mengenai persoalannya dengan Sultan Muhammad Zainuddin⁶. Ternyata, penuturan pangeran tak memuaskan kelima Putra Bugis ini, sehingga Opu Daeng Perani memohon kepada Pangeran Agung supaya Sultan Muhammad Zainuddin dilepaskan. Namun permintaan ini ditolak. Penolakannya pun tidak dipedulikan, bahkan tanpa rasa takut mereka menemui Sultan Muhammad Zainuddin dan membawanya ke Banjarmasin.

Di Banjarmasin, mereka membujuk Sultan Muhammad Zainuddin supaya kembali memimpin Kerajaan Tanjungpura. Akhirnya Sultan berani kembali dengan jaminan Opu Daeng Manabung bersaudara bersama pasukannya.

Penyusunan strategi dilakukan di Kuala Kandang Kerbau untuk merebut kembali kekuasaan. Namun, sebelumnya Opu Daeng Manabung dikawinkan dengan Putri Kesumba bergelar Ratu Agung Sinuhun⁷. Salah satu strategi mereka dengan menemui kedua menantu Pangeran Agung pertemuan dimaksudkan supaya perang dapat dihindari sehingga tidak

⁶ Opu Daeng Manabung Bersaudara dalam menerima informasi tidak mempercayai begitu saja tetapi mengadakan “Cek dan Ricek “ atau “Tabayyun“ terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, sehingga penentuan siapa yang salah tidak terjadi kekeliruan.

⁷ Putri Kesumba Anak Sultan Muhammad Zainuddin dari Isteri Pertama Bernama Ratu Sultan Indrawati (Putri Panembahan Senggau Kerajaan Mempawah).

menelan korban. Apalagi kedua pihak sekampung bahkan kerabat sendiri, dan apabila terjadi korban di antara mereka, akan menyebabkan perang saudara. Akhirnya Daeng Matakud dan Tuan Haji Upas meninggalkan Tanjung Pura menuju Riau.

Strategi berikutnya mereka mengepung istana bahkan Opu Daeng Manabung dan Opu Daeng Parani dapat menembus istana dan menemui pangeran agung. Pada awalnya, pangeran mau melakukan perlawanan. Hal ini tak terjadi, karena Opu Daeng Manabung langsung menyampaikan bahwa kedua menantu pangeran telah pergi. Akhirnya pangeran pun menyerah dan ditahan seumur hidup di kuala kandang kerbau (Musni Umberan dkk., 1996: 8).

Sultan Muhammad Zainuddin menawarkan kepada Opu Daeng Manabung menetap di Tanjung Pura, sebagai ucapan terima kasih. Apa lagi putra Bugis ini telah menjadi menantunya. Permintaan ini ditolak dengan alasan tenaganya masih dibutuhkan di Johor dalam menghadapi serangan Kerajaan Riau.

Pada tahun kurang lebih 1722, Opu Daeng Manabung kembali ke Tanjung Pura. Saat itu terjadi kekacauan diantara anak-anak Sultan, mereka berebutan tahta kerajaan. Opu Daeng Manabung dapat mendamaikannya dengan cara pembagian daerah kekuasaan, sehingga dia diberi gelar Pangeran Mas Surya Negara. Tak lama berselang, Panembahan Senggauk meninggal dunia. Tahta kerajaan Mampawa diserahkan kemenantunya (Sultan Muhammad Zainuddin), oleh Sultan diserahkan lagi

kepada Opu Daeng Manabung untuk menduduki tahta kerajaan kakek mertuanya. Maka berangkatlah Opu Daeng Manabung bersama keluarga ke Mampawah.

Menurut Zulkarnain (pemangku adat istana Amantubillah) dalam koran Pontianak Post kedatangan Opu Daeng Manabung dan keluarga disambut masyarakat di muara Sungai Mempawah. Kemudian, rombongan ini mengumandakan suaran adzan untuk pertama kalinya (Tim Peneliti Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak atau STAIN Pontianak, 1996: 56) (Kerajaan Mampawah menganut agama Hindu), dilanjutkan dengan salat duhur secara berjamaah dan makan siang bersama masyarakat.

Sewaktu Opu Daeng Manabung menjadi Raja di Mampawah, beliau mengadakan perombakan. Pertama, memindahkan pusat pemerintahan dari Senggau (daerah agraris) ke Sebukit Rama (daerah maritim) yang selalu didatangi pedagang karena daerah tersebut merupakan pusat lalu lintas perairan. Perpindahan ini membawa dampak bagi masyarakat, yang masyarakat tidak hanya mengandalkan kehidupan dari pertanian tetapi juga dari perdagangan, sehingga di masyarakat terjadi “evolusi budaya“ yang merubah pola laku dan pola cita (Sidi Gazalba, 1978: 355). Kedua, sistem pemerintahan. Selama ini Kerajaan Mempawah sistem pemerintahannya berdasarkan hukum adat, yakni hukum adat Suku Dayak. Namun, setelah Opu Daeng Manabung menjadi seorang Raja, Dia

menambahkan sistem pemerintahan yang berdasar hukum syara yang bersumber dari agama Islam.

Pemberlakuan hukum syara sebagai hukum pemerintahan, membuat agama Islam menyebar sampai ke daerah sekitar Mempawah. Sejak saat itu pula, Kerajaan Mempawah berubah menjadi Kerajaan Islam (Musni Umberan dkk., 1996: 16). Dalam menerapkan hukum syara, Opu Daeng Manambung mengangkat Imam dan Khatib, Bilal dan Lebai serta para Ulama dibidangnya masing-masing sebagai pendamping dia dalam persoalan agama bagi sesuatu masalah seperti mengenai suatu keputusan menentukan permulaan puasa Ramadhan dan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idhul Adha dan *Ta'lik* dalam pernikahan yang disebut “Amar Raja” yaitu keputusan atau perintah raja (Ellyas Suryani bin Soren dkk., 2001: 22).

Perhatian Opu Daeng Manambung terhadap pengembangan Agama Islam sangat tinggi. Beliau mengundang Habib Husin al-Qadri⁸ menetap di Mempawah untuk menyiarkan Agama Islam dan mengajarkan penduduk membaca al-Qur'an, ilmu fiqhi dan hadis. Penyebaran Agama Islam yang sangat pesat menyebabkan kerajaan Mempawah ramai didatangi penduduk dari berbagai daerah seperti Sintang, Sanggau dan lain-lain (Muhammad Syamsu, 1999: 91). Bahkan kerajaan Mempawah yang pada awalnya adalah Kerajaan Hindu berubah menjadi Kerajaan Islam.

⁸ Habib Husin al-Qadri adalah ulama yang berasal dari Trim Hadra Maut Arab, dia menikah dengan Nyai Tua (sepupu Sultan Matan).

Menurut Mardan Adi Jaya (Calon Penembahan Istana Amantubillah Mempawah) dalam koran Pontianak Post pada masa pemerintahan Opu Daeng Manambung, dia menciptakan persatuan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam armada pemerintahannya terdiri dari berbagai macam suku yakni Dayak, Tionghoa, Bugis serta Melayu. Walaupun ada perbedaan agama di antara mereka, itu tidak dipersoalkan karena adanya sikap toleransi dalam kehidupan beragama (Sutini Ibrahim, 1995: 6).

Pada hari senin, pukul 21.00 tanggal 20 Safar 1175 Hijriah atau 1761 Masehi. Opu Daeng Manambung menghadap Sang Khalik. Dia memerintah selama 20 tahun mulai tahun 1741. Dia meninggalkan seorang istri dan sepuluh orang anak (Musni Umberan dkk., 1996: 16). Di antara anak-anaknya 3 orang yang terkenal yaitu:

1. Utin Dawaman kawin dengan Ratu Bagus dari Kerajaan Landak Ngabang.
2. Gusti Jamiril bergelar Panembahan Adi Wijaya Kusumajaya kawin dengan sepupunya anak Daeng Kelola Bin Opu Daeng Biasa. Opu Daeng Biasa adik kandung dari Opu Daeng Rilaga Ayahanda Opu Daeng Manambung (J.U. Lontaan, 1975: 124).
3. Utin Cendra midi kawin dengan Syarif Abdurrahman anak dari Habib Husen al-Qadri (Musni Umberan dkk., 1996: 17), pendiri Kerajaan Pontianak.

Setelah Opu Daeng Manambung wafat ia digantikan oleh anaknya Gusti Jamiril. Pada masa pemerintahannya Belanda

datang ke Mempawah untuk menguasai perdagangan dan kerajaan. Namun, ambisi mereka tidak terlaksana karena Gusti Jamiril sangat anti terhadap imperialisme Belanda. Keantiannya menyebabkan Belanda menyerang kerajaan Mempawah. Sehingga korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Untuk menghindari pertumpahan darah yang semakin banyak Gusti Jamiril mengundurkan diri ke Sungai guna mengatur siasat perang (Musni Umberan dkk., 1996: 17).

Gusti Jamiril meninggal dunia pada hari Ahad Dzulhijjah 1204 Hijriah bertepatan dengan tahun 1790 masehi. Perjuangan beliau dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni Gusti Jati dan Gusti Mas. Dari perjalanan Opu Daeng Manambung bersaudara memperlihatkan bahwa pengembaraan mereka dibekali oleh 3 ujung, yakni ujung lidah yang ditandakan dengan kemampuan berdiplomasi. Ujung Badi' yang berarti keberanian mereka sangat dikenal sehingga sering dimintai pertolongan oleh kerajaan-kerajaan. Ujung Air yakni melalui perkawinan.

Selain faktor yang sudah dipaparkan di atas yang membuat orang Bugis melakukan migrasi. faktor keamanan juga yang mengakibatkan kelaparan (penjataan beras) membuat mereka meninggalkan daerahnya.

Biro pusat statistik (BPS) mengenai migrasi antar daerah pada tahun 1978, 1983 dan 1985 yang dikutip Secha Alatas dan Edy Priyono (1993) memperlihatkan bahwa di daerah Jawa dan Sulawesi migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi ke dalam,

sedangkan di daerah Sumatera dan Kalimantan migrasi ke dalam melebihi migrasi keluar (Kamanto Sunarto, 2004: 171).

Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari berbagai macam etnis dengan latar belakang budaya yang beragam. Hal ini disebabkan antara lain pada proses migrasi dari berbagai kelompok etnis yang berbeda. Secara realitas, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Pontianak (dahulu Kerajaan Mempawah) pernah dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari kelompok etnis Bugis yang melakukan migrasi, raja tersebut bernama Opu Daeng Manambung (Fitri Kusumayanti, 2007: 64).

Migrasi adalah suatu kegiatan yang memang biasa dilakukan dalam suatu masyarakat, karena tujuan migrasi bermacam-macam. Salah satunya migrasi mempengaruhi perkembangan ekonomi dan investasi daerah tujuan. Apalagi kalau didukung pencitraan lapangan kerja, pengembangan sektor modern, kemudahan sarana komunikasi dan angkutan, liberalisasi arus tenaga kerja antar daerah, akan mempunyai dampak untuk menarik para imigran (M. Munandar Soelaeman, 2001: 195-196).

Terlihat dari berbagai tulisan yang ada, bahwa kelompok orang Bugis ini, sebagian dari mereka melakukan transmigrasi spontan atau swakarsa. Seperti yang dikemukakan oleh Sudagun, yaitu transmigrasi yang biasanya ditanggung oleh transmigran sendiri atau pihak-pihak lain yang bukan dari unsur pemerintah (Hendro Suroyo Sudagun, 2010: 15). Pernyataan ini

diperkuat oleh Christian Pelras bahwa pada abad ke-18 orang Bugis yang memiliki aktivitas utama sebagai pedagang merupakan populasi mayoritas yang menguasai sebagian ekspor timah dan produk hutan tertentu yang berasal dari Semenanjung Melayu. Di pesisir Barat Kalimantan, orang Bugis menguasai perdagangan di sekitar Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Sambas juga Kubu Raya (Christian Pelras, 2006: 73).

Sebagai pelaut yang cekatan, mereka telah meninggalkan suatu hukum niaga dalam pelayaran, yang disebut *Ade' Alloping-loping Bicaranna Pabalue* yang ditulis dalam lontara Amanna Gappa, kepala komunitas Wajo di Makassar yang menjabat sejak 1697 hingga 1723. Isinya mencakup aturan-aturan yang harus diindahkan oleh para nakhoda, kelasi, dan juragan dalam pelayaran dan perdagangan, begitu juga aturan-aturan atau tata krama dengan para pemimpin dan pembesar bandar yang mereka kunjungi (Usman Pely, 1996: 131). Rincian isi undang-undang maritim Ammana Gappa adalah sebagai berikut:

1. Mengenai ongkos perjalanan; persentase yang diterima (*sima'*) dari keuntungan barang yang diangkut, sesuai rute yang dilalui.
2. Mengenai pembagian keuntungan antara pemilik dan kapten perahu, jika posisi itu tidak dipegang orang yang sama.
3. Mengenai biaya pengembalian barang tak terjual.

4. Mengenai tindakan yang diambil jika kapten mengubah tujuan perahu, serta hak dan kewajiban orang-orang yang berangkat; anak buah perahu (*sawi*) tetap, pedagang, penumpang; juga ruang yang dialokasikan untuk barang mereka.
5. Mengenai otoritas juru mudi dan juru batu.
6. Mengenai prasarat dan kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi kapten perahu.
7. Mengenai berbagai macam kerjasama komersial; kongsi antara pedagang dan pemilik barang; bagian yang diperoleh pedagang dari keuntungan pemilik barang; pendelegasian barang kepada pedagang dengan harga tetap yang akan dibayarkan berdasarkan laba; pembayaran laba dari barang yang terjual selama perjalanan, atau pengembalian barang tak terjual; pendelegasian barang kepada orang kepercayaan oleh pemilik barang.
 - a. Mengenai utang selama pelayaran.
 - b. Mengenai pewarisan dari pedagang yang meninggal dalam pelayaran.
 - c. Mengenai penyelesaian pertikaian antara para pedagang.
 - d. Mengenai kewajiban untuk mengajukan perselisihan yang muncul di atas perahu pada peradilan yang dipimpin kapten perahu.
 - e. Mengenai aturan khusus yang mempengaruhi utang dan peminjaman.

- f. Mengenai pembayaran utang
- g. Mengenai tindakan terhadap budak yang telah dipercayakan sejumlah barang dan melakukan pelanggaran hukum di atas perahu.
- h. Mengenai tindakan atas barang milik pedagang yang meninggal selama pelayaran.
- i. Mengenai kewajiban membayar kembali uang pinjaman dalam bentuk uang dan barang dengan barang.
- j. Mengenai tanggung jawab *kalula* (orang kepercayaan, yang mewakili pedagang yang tidak ikut berlayar).
- k. Mengenai utang orang kepercayaan dan budak pemilik barang.
- l. Mengenai biaya yang diminta dari orang yang kapalnya karam dan diselamatkan di tengah laut.

Walaupun menurut Cristian Pelras, perdagangan laut Bugis belum menonjol sebelum kejatuhan Kerajaan Makassar pada tahun 1666-1667 setelah hampir satu abad menguasai pelayaran. Perdagangan laut Bugis dikembangkan oleh orang Bone yang bermukim di Cendrana, Bajoe, dan Kajuara, terutama para pelaut Wajo yang berlayar dari Danau Tempe atau jika tidak ingin membayar pajak kepada Bone (yakni penguasa benteng Cendrana yang menjaga muara sungai Cendrana), mereka berlayar dari pelabuhan sendiri di Doping dan Peneki, terutama dari Makassar yang orang Wajo memiliki komunitas sendiri yang cukup penting posisinya. Pangkalan perdagangan

Bugis lainnya di luar Sulawesi Selatan adalah Flores, Sumbawa, Lombok, Bali, Nusa Tenggara, Gresik di Jawa Timur, Bone Rate di laut Flores, Kaili di Barat laut Sulawesi, Kutai, Pasir, Pegatang, Pulau Laut dan Pontianak masing-masing di bagian Timur, Tenggara dan Barat Kalimantan, Jakarta, Riau dan Tanah Melayu lainnya (Christian Pelras, 2006: 303).

Orang Bugis menguasai perdagangan sejak awal terbentuknya Kerajaan Qadaria di Pontianak oleh Syarif Abdurrahman, bahkan sampai abad 20 masih ditemukan kumpulan saudagar Bugis. Rumah mereka terletak di sekitar pelabuhan. Mereka tidak hanya berperan dalam bidang perdagangan tetapi memasuki segala lini kehidupan di Pontianak (Patmawati, 2014: 70). Dengan demikian, dapat dikatakan orang bugis menjadi salah satu penentu perjalanan sejarah Kalimantan Barat. Hal ini dilihat dari pernikahnya Opu Daeng Manambung dengan Putri Kusumba anak dari Sultan Muhammad Zainuddin. Selanjutnya, anak dari Daeng Manambung dikawinkan dengan Syarif Abdurrahman.

Pada dekade pasca perang dunia 2 menurut Cristian Pelras, banyak orang Bugis yang terus menerus pindah keluar, sehingga tingkat populasi Sulawesi-Selatan berada jauh di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia, antara 1969 dan 1980. Populasi penduduk Sulawesi Selatan bahkan mengalami penurunan 8.762 jiwa. Hal tersebut terjadi meskipun sejak tahun 1930 an Luwu dan Polewali sebelum berpisah menjadi Provinsi Sulawesi Barat) dijadikan tujuan daerah

transmigrasi orang Jawa, sekaligus membuktikan bahwa gelombang migrasi orang Bugis bukan sekedar akibat kelebihan populasi atau tidak adanya lahan yang bisa digarap di kampung halaman mereka (Christian Pelras, 2006: 73).

Selanjutnya, Christian Pelras menyatakan bahwa para perantau Bugis di tanah Melayu bukan sekedar petani tradasional, akan tetapi pengusaha berorientasi ekonomi. Jika memperoleh uang yang cukup besar, maka mereka akan berencana untuk menginvestasikan kembali uang itu dalam bidang transportasi dan perniagaan, atau menyewakan lahan mereka kepada petani Bugis yang baru tiba, dan selanjutnya mencari tempat-tempat yang lebih menguntungkan (Christian Pelras, 2006: 376).

Menurut Cristian Pelras, tujuan migrasi orang Bugis adalah upaya mencari pemecahan terhadap konflik pribadi, menghindari penghinaan, kondisi yang tidak aman, atau keinginan untuk melepaskan diri dari kondisi sosial yang tidak memuaskan, maupun hal-hal yang tidak diinginkan akibat tindak kekuasaan yang dilakukan ditempat asal. Hanya saja, alasan seperti itu tampaknya tidak cukup memadai untuk dijadikan landasan dalam memahami mengapa begitu banyak tersebar pemukiman orang Bugis di seluruh Nusantara sejak akhir abad ke-17. Juga tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa terlepas dari keadaan yang terus berubah, aktivitas perantauan justru merupakan ciri khas *permanent* orang Bugis hingga kini (Christian Pelras, 2006: 370-371). Walaupun para perantau

Bugis sekarang ke wilayah Kalimantan Barat tidak seramai lagi seperti perantau pada masa lalu, karena jalur transportasi melalui laut sudah tidak ada yang langsung berlabuh di pelabuhan Kalimantan Barat. Begitu juga orang Bugis pemilik kapal sudah mulai berkurang tinggal satu dua buah kapal. Biasanya anak-anak pemilik kapal tidak mengikuti jejak orang tuanya.

Menurut Soemardjan di dalam Mattuladda, mengatakan etnis Bugis sudah melakukan perantauan sejak abad ke-16. Pada jaman itu ada suatu rangkaian peperangan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi-Selatan, yang diikuti oleh peperangan-peperangan melawan Belanda pada abad ke-19. Melihat kenyataan tersebut, dapat dilihat bahwa telah ada suatu keadaan yang tidak aman sejak lebih dari 3 abad lamanya, sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas merantau, misalnya ke daerah-daerah pantai Timur dan Utara Sumatera, Pantai Barat dan Selatan Kalimantan (Mattulada, 1988: 269-270).

Mattuladda menyatakan bahwa migrasi secara besar-besaran dari orang Bugis yang terakhir terjadi sejak tahun 1950, karena ada kekacauan berhubungan dengan mengganasnya tentara Belanda. Kemudian pemberontakan Kahar Muzakkar terhadap Republik Indonesia.

Migrasi selanjutnya terjadi sekitar tahun 70-an karena adanya pengiriman guru-guru yang dibutuhkan di Kalimantan Barat. Para Guru ini ada yang tetap bertahan di Kalimantan Barat bahkan menikah dengan penduduk setempat baik itu etnis

Bugis maupun etnis Melayu, ada juga yang balik ke daerah masing-masing.

Peneliti bertemu dengan mereka, karena paman peneliti yang bernama Daeng Ngemba dahulunya berprofesi sebagai pelaut mengunjungi peneliti di Pontianak dan memberitahukan bahwa peneliti memiliki keluarga di Kalimantan ini. Akhirnya Daeng Ngemba mengajak mereka ke rumah. Kenyataan ini diperkuat lagi sewaktu peneliti turun lapangan Ke Punggur, Desa Pal IX dan Desa Nipah Panjang, peneliti bertemu mereka. Sedangkan migrasi orang Bugis belakangan ini terjadi karena mereka mencari pekerjaan khususnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Faktor yang mempengaruhi orang-orang Bugis melakukan migrasi tidak terlepas dari karakter dasar mereka. Menurut Christian Pelras, ciri-ciri orang Bugis yang berkaitan dengan karakternya dikenal dengan karakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Untuk mempertahankan kebenarannya, bila perlu, mereka bersedia melakukan tindak kekerasan. Meski demikian, dibalik sifat keras itu, orang Bugis juga dikenal sebagai orang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawannya (Christian Pelras, 2006: 5).

Karakter orang Bugis keras, menurut Zainal Abidin, dikutip oleh Yusriadi (2008: 192-193), ada tiga faktor yang mempengaruhi: pertama, tradisi maritim. Nenek moyang orang Bugis adalah To Luwu yang berarti pelaut. Konon, sejak abad

pertama orang Bugis telah berlayar sampai ke Afrika. Pada tahun 1992 perahu “Damar Segara” dengan nakhoda Muhammad Yunus Daeng Eko mencoba menapaktisasi jalur pelayaran itu dan berhasil mendarat di Madagaskar. Mereka juga telah lama menemukan dan kawin dengan orang Marege (sebutan Bugis untuk suku Maori) di Australia Barat, jauh sebelum James Cook menemukannya. Kedua, tradisi berkompetisi. Mereka senantiasa hidup dalam suasana penuh persaingan. Bahkan dengan saudara sendiri. Mereka yang kalah banyak yang pergi merantau. Dirantau, mereka pantang menjadi anak buah meskipun hanya menjadi pemimpin kecil. Banyak di antara mereka yang memperoleh jabatan strategis bahkan menjadi raja seperti di Johor, Pahang, Selangor, Pontianak, Kutai dan lain-lain. Migrasi besar-besaran kemudian terjadi pada abad ke-17. Setelah itu mulai menurun. Motivasi merantaunya pun mulai bergeser. Bahkan pada tahun-tahun terakhir ini puluhan ribu menjadi buruh di perkebunan Malaysia. Apabila ada yang terusir dari Malaysia, mereka menjadikan Kalimantan Barat sebagai tempat transit. Ketiga, penderitaan yang lama akibat penjajahan. Meskipun tidak selama di Jawa, tetapi akibat yang ditimbulkannya tidak kalah hebat. Rakyat mengalami kemiskinan moril dan materil. Setelah itu daerah Sulawesi Selatan masih terus dilanda kekacauan yang dampaknya masih terasa sampai pertengahan tahun 60-an.

Ciri khas orang Bugis adalah kemampuan mereka berubah dan menyesuaikan diri. Ini merupakan modal terbesar yang

memungkinkan mereka dapat bertahan dimana-mana selama berabad-abad (Christian Pelras, 2006: 5). Kemampuan untuk bertahan seperti yang dikemukakan di atas mungkin juga ditopang oleh nilai-nilai kebudayaan Bugis. Menurut H.A. Rahman Rahim, nilai-nilai kebudayaan Bugis meliputi: nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan, dan usaha (H. A. Rahman Rahim, 1992: 144).

1. Kejujuran

Dalam bahasa Bugis, jujur disebut *lempu*. ' *Lempu*' sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Adakalanya *lempu*' diartikan juga ikhlas, benar, baik atau adil (H. A. Rahman Rahim, 1992: 145). Kata *lempu*' dalam ungkapan lontara dapat dilihat pada dialog antara Tociung (cendekiawan Luwu) dengan La Manussa Toakkarangeng (calon raja atau datu Soppeng). Tociung menyatakan:

“Eppa’i gau’na lempu’e: risalaie naddampeng, riparennu Angie temmaceko bettuanna risanresi teppabbeleang, temmangoangenngi tania olona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudecengi” (H. A. Rahman Rahim, 1992: 145).

Artinya

“Ada empat perbuatan jujur, yaitu (a) memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (b) dipercaya lalu tak curang, artinya disandari lalu tak berdusta; (c) tak

menyerakahi yang bukan haknya; (d) dan tak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama.”

Pengertian *lempu'* atau *alempureng* sebagai sebuah nilai luhur budaya, seperti yang diungkapkan oleh Tociung memperlihatkan bahwa *lempu'* atau *alempureng* merupakan ungkapan dan perbuatan yang berasal dari hati nurani. Artinya, *tau malempu* (orang yang jujur) mendasarkan ucapan dan perbuatannya dari hati nurani. *Lempu'* atau *alempureng* adalah sebuah sikap yang menancapkan tiangnya jauh ke lubuk hati karena manusia harus jujur kepada dirinya sendiri, membentang universal ke seluruh umat manusia karena kejujuran juga harus bagi umat manusia dan menggantungkan nilainya pada kemahakuasaan Allah swt. karena dia hanya bernilai spritual dan dalam jiwa merupakan refleksi ketaatan kepada Allah swt. karena itu, maka *lempu'* atau *alempureng* bukan saja menjadi modal harga diri pribadi tapi juga modal dasar untuk menjadi pemimpin sekaligus modal dasar bagi sejahteranya masyarakat, bangsa, dan negara (M. Saleh Mude dkk (ed), 2009: 24-25).

2. Kecendekiaan

Ungkapan lontara sering meletakkan berpasangan nilai kecendekiaan dengan nilai kejujuran, karena kedua-duanya saling mengisi. Sebagai contoh ungkapan berikut ini:

“Aja nasalaiko acca sibawa lempu,’ naia riasenge acca, de’gaga masusa napogau’ de to ada masussa nabali ada madeceng malemmae; mateppei ripadanna tau. Naia riasenng lempu’ makessingi gau’na, patujui nawanawanna, madeceng ampena, namatau’ ri dewatae” (M. Saleh Mude dkk (ed), 2009: 153).

Artinya:

“Jangan sampai engkau ketiadaan kecendekiaan dan kejujuran. Adapun yang dinamakan cendekia ialah tidak ada sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut lagi percaya kepada sesamanya manusia. Yang dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Allah.”

Dari petuah di atas, *to acca* atau cendekiawan dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan adalah orang-orang yang mampu mengetahui atau merasakan kebenaran yang datang dari *Dewata Seuwae* dihati nuraninya. Kata-kata hikmah atau petuah dan nasehat yang membimbing kepada jalan kebenaran hanya berasal dari orang-orang yang dapat merasakan apa yang terdapat dalam hati nurani. Jadi cendekiawan adalah orang-orang yang memadukan antara akal dan hati nurani. Oleh karena itu, konsep *acca* dalam tradisi dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan terasa sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengelola

kehidupan di alam semesta ini (M. Saleh Mude dkk., 2009: 27-28).

3. Kepatutan

Kepatutan, kepantasan, kelayakan adalah terjemahan dari kata Bugis *asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut . (H. A. Rahman Rahim, 1992: 157). Lontara mengatakan “*Pontudanngi tudammu, puonroi onromu*” artinya: duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. *Ade’ wari* (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. *Ade’ wari* berfungsi menjaga/memelihara tata-susunan atau tata-penempatan sesuatu menurut urutan semestinya (Mattulada, 1985: 380). Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Merusak tata tertib ini adalah kezaliman. Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan adalah suatu perlakuan yang patut. Banyak atau sedikit tidak dipersoalkan oleh *sitinaja* .“*Alai cedde’e risesena engkai mappedeceng sampeanngi maegae risesena engkai maega makkasolang*”

Artinya: “Ambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan” (H. A. Rahman Rahim, 1992: 158).

4. Keteguhan

Keteguhan dalam bahasa Bugis disebut *getteng*. Selain berarti teguh, kata ini pun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu (H. A. Rahman Rahim, 1992: 161). Tociung mengatakan perbuatan nilai keteguhan sebagai berikut:

“Eppa’i gau’na gettennge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicarai naparapi mabinru’i tepupi napaja.”

Artinya:

“Empat perbuatan nilai keteguhan: tak mengingkari janji, tak mengkhianati kesepakatan, tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung” (H. A. Rahman Rahim, 1992: 161-162).

5. Usaha

Nilai usaha merupakan nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai kejujuran, kecendikiaan, kepatutan dan keteguhan. Nilai-nilai ini baru berperan secara tepat guna dan daya guna apabila didukung oleh nilai usaha. Dengan sendirinya nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut (H. A. Rahman Rahim, 1992: 165).

Lontara mencela orang yang tidak punya usaha, yang bermalas-malas menghabiskan waktunya:

“E kalaki! De’ga gare pallaommu muonro risese lalang? Ianaritu riaseng kedomatuna, gau’

temmakketuju. De' kua de'gaga pallaommu, laoko ri barugae mengkalinga bicara ade,' iare'ga laoko ri pasa'e meogkalinga ada pabbalu.' Mapatoko sia kalaki! Nasaba' resopa natinulu' temmanngingi' malomo naletei pammasena dewata''

Artinya

“Hai kalian anakku! Apabila sudah tak ada pekerjaanmu, lalu kamu bermain-main saja. Itulah yang dinamakan perbuatan hina dan perbuatan yang tak ada gunanya. Jikalau tidak ada pekerjaanmu, pergilah ke balairung mendengar soal adat, ataukah engkau ke pasar mendengar warkah penjual. Rajinlah berusaha, hai anak-anakku. Sebab hanya dengan jerih payah dan ketekunan serta ketakbosanan yang dilimpahi rahmat Dewata” (H. A. Rahman Rahim, 1992: 165-166).

Nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sulawesi Selatan seperti yang diungkapkan di atas bersifat universal, jadi bukan hanya dapat berlaku dalam lingkup masyarakat Sulawesi Selatan, akan tetapi dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan lebih dari itu, nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sulawesi Selatan dapat diterapkan dalam lingkup kemanusiaan universal karena nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sulawesi Selatan tersebut, pada dasarnya bersifat universal. Nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sulawesi

Selatan berasal dari nurani manusia, sedangkan nurani manusia bersifat universal (M. Saleh Mude dkk., 2009: 95).

B. Bahasa dan Aksara Bugis di Kalimantan Barat

Bahasa memiliki dua arti. Arti pertama bahasa berasal dari pandangan tentang kesadaran yang luar biasa tentang *social self*. Arti kedua merupakan pandangan dari sebuah hipotesis kemahatahuan para pengamat tentang seluruh sistem *mind* manusia. Dua arti ini sangat berbeda satu sama lain, dan gagal membuat satu keputusan yang tepat tentang bahasa. Bahasa menurut *social self definition* adalah sistem komunikasi manusia dengan menggunakan bahasa; dan menurut *whole system definition*, bahasa adalah sebuah sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif (Alo Liliweri, 2003: 130).

Bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran, tidak sekedar mengalihkan informasi. Bahasa menyatakan kesadaran dalam konteks sosial. Inilah media paling baik untuk menyatakan struktur kesadaran, kepercayaan dan lain-lain. Oleh karena itu banyak orang yang bilang kalau bahasa menyatakan pikiran bahkan prosedur pengujian struktur berfikir tentang sesuatu. Ada hubungan yang erat antara bahasa dengan kesadaran di mulai semenjak pernyataan bahwa *we speak our mind with language*, atau kita berbicara dengan akal melalui bahasa. Artinya, jika tahu bahasa maka tahu tentang mental orang lain yang diungkapkan dalam kata-kata (emosi).

Dalam komunikasi antar manusia sehari-hari dikenal istilah-istilah seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa jarak dan lain-lain. Semuanya itu merupakan gambaran tentang aspek pragmatis dari penggunaan bahasa. Manusia memahami bahasa lisan hanya karena penggunaan bahasa itu melalui alat ucap yang dalam istilah komunikasi disebut *oral communication*. Selain penyampaian pesan dilakukan dengan oral/lisan maka kadang-kadang manusia mengalihkan pesan melalui tulisan, itulah yang disebut *verbal communication*.

Dalam studi kebudayaan (*culture*), bahasa ditempatkan sebagai sebuah unsur penting selain unsur-unsur lain seperti sistem pengetahuan, mata pencaharian, adat istiadat, kesenian, sistem peralatan hidup dan lain-lain. Bahkan bahasa dapat dikategorikan sebagai unsur kebudayaan yang berbentuk non material selain nilai, norma, dan kepercayaan (*belief*) (Alo Liliweri, 2003: 132).

Menurut Fitri Kusumayanti (2007: 81), bahasa merupakan bagian dari tradisi budaya sekelompok orang. Karenanya, ketika sekelompok orang terobsesi oleh semangat pelestarian budaya leluhur beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka penggunaan bahasa terkait pun akan mereka pertahankan. Lebih jauh lagi, di dalam bahasa terkandung simbol-simbol identitas dan jati diri penggunanya. Bahasa tertentu identik dengan masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah bahasa Bugis. Bahasa Bugis akan identik dengan kelompok-kelompok etnis Bugis.

Bahasa Bugis, pada zaman dahulu, menjadi bahasa untuk semua kegiatan kebudayaan orang Bugis. Bahasa itu dipergunakan dalam menyebarkan agama, dalam perdagangan, pertanian dan ilmu kesusasteraan (Mattulada, 1985: 8). Pengaruh bahasa Bugis dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Landak, dimana Islam masuk pada tahun 1983, dapat dilihat dari doa-doa mereka, seperti doa masuk hutan atau sungai, mereka mengucapkan kalimat *barakka Allah Ta'ala kun fayakun*. Setelah diselidiki, rupanya guru mereka di Islam kan oleh orang Bugis, lewat pendekatan budaya. (Patmawati, 2014: 89)

Bahasa Bugis merupakan lambang bunyi atau aksara yang disebut aksara *lontara*, hasil kesusasteraan orang Bugis yang tertulis dengan aksara *lontara*, telah dimulai sekitar abad ke-XVI, yaitu sebelum agama Islam dianut secara umum oleh penduduk Sulawesi Selatan. Baik tanda-tanda bunyi atau aksara *lontara* maupun hasil-hasil kesusasteraan Bugis (klasik) erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam *panngaderreng* (Mattulada, 1985: 8). *Panngaderreng* adalah wujud ideal dari tata kelakuan, karena berfungsi sebagai pengatur kelakuan, dan mengekspresikan keberadaannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Patmawati, Fitri Kusumayanti dan Firdaus Putra, 2004: 1).

Pada mulanya kesusasteraan orang Bugis yang ditulis dalam lontara-lontara, adalah kesusasteraan suci, berupa mantera-mantera dan kepercayaan-kepercayaan mitologis.

Lambat laun hasil-hasil kesusasteraan yang bersifat keduniaan berkembang juga, sesuai dengan perkembangan lontara dan sikap hidup masyarakat serta kebudayaannya.

Sehubungan dengan penciptaan tanda-tanda bunyi yang disebut aksara lontara terdapat anggapan bahwa hal itu berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis, yang memandang alam semesta ini, sebagai *sulapa eppa wolasuji* (segi empat belah ketupat). Sarwa alam ini, adalah satu kesatuan, dinyatakan dalam simbol $\diamond = sa$, yang berarti = *seua* (tunggal atau esa) (Mattulada, 1985: 8).

Simbol \diamond ini, bermakna mikrokosmos/*sulapa' eppa'na taue* (segi empat tubuh manusia), di puncak terletak kepalanya, di sisi kiri dan kanan ada tangannya, dan ujung bawah adalah kakinya. Simbol itu menyatakan diri secara konkrit pada bahagian kepala manusia yang disebut *sauang* $\diamond \rightsquigarrow \rightsquigarrow$, berarti mulut atau tempat keluar. Dari mulutlah segala sesuatu dinyatakan ialah $\diamond \heartsuit = sadda$ (bunyi). Bunyi-bunyi itu disusun sehingga mempunyai makna (simbol-simbol) yang disebut $\rightsquigarrow \heartsuit$ *ada* (kata atau logos). Bila kata itu dibubuhi kata sandang tertentu yaitu E, ia menjadi $\rightsquigarrow \heartsuit \leftarrow \rightsquigarrow = adae'$ (kata itu). Inilah yang menjadi pangkal kata $\rightsquigarrow \heartsuit$ = *ade'* (adat). *Ade'*, yakni sabda atau penerbit yang meliputi sarwa alam. Seperti diutarakan dalam kata-kata hikmat *paseng* (wasiat yang dipertaruhkan. Ia menekankan tentang keharusan dan pantangan. Orang yang memelihara *paseng* akan selalu terpandang di masyarakatnya. Sebaliknya mereka yang tak mengindahkannya

akan menanggung sanksi sosial yang amat berat) (H. A. Rahman Rahim, 1992: 84) :

Sabda mappabati' ada = bunyi mewujudkan kata
Ada mappabati' gau' = kata mewujudkan perbuatan
Gau' mappabati' tau = perbuatan mewujudkan manusia

(Mattulada, 1985: 9).

Tanda-tanda bunyi dalam aksara lontara bersumber dari  = sa (segi empat ketupat), sebagai berikut:

ka	ga	nga	nka	
				
pa	ba	ma	mpa'	
				
ta	da	na	nra'	
				
ca	ja	nya	nca'	
				
ya	ra	la	wa	
				
sa	a	ha		
				
o	é,	e,	u,	i
				

(Mattulada, 1985: 9).

Menurut Nurhayati Rahman: para peneliti huruf lontara seperti Mills, Noorduyn dan Fachruddin sepakat bahwa huruf

memberikan surat penelitian ini, mereka bertanya: “Dari mana?” saya menjawab “Dari Sulawesi Selatan”. Spontan mereka mengatakan “*aga kareba?*” peneliti pun menjawab “*madeceng?*”. Setelah terjadi dialog lebih lanjut di ruangan tersebut, ada beberapa suku Melayu keturunan Bugis, begitu juga dengan kepala bidangnya. Bagi etnis Bugis yang tetap mempertahankan bahasa Bugis, mereka beranggapan bahwa bahasa merupakan alat yang dapat membedakan dari etnis mana seseorang itu berasal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Cengkong dalam Patmawati (2014: 90) bahwa dulu semua orang yang tinggal di Punggur ini adalah Bugis berkomunikasi dalam keseharian dengan menggunakan bahasa Bugis. Tapi sekarang, seiring dengan berjalannya waktu, banyak kelompok etnis lain yang berdatangan untuk menetap di sini. Sehingga bahasa Bugis pun bukanlah merupakan satu-satunya bahasa yang digunakan di Punggur. Namun demikian, tetap dapat dibedakan apakah orang tersebut Bugis atau tidak dari segi bahasanya.

Dalam berkomunikasi, ciri khas orang Bugis dapat diketahui dari aksen, yang menunjukkan pemilikan *pronunciation* (tekanan dalam pengucapan) dan juga dalam dialek, yakni variasi bahasa, dengan kosa kata yang khas (Alo Liliweri, 2003: 135), seperti kata *iyé*. Khusus di Kalimantan Barat, kelompok etnis mana pun yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat baik ia berasal dari Makassar, Mandar, maupun Toraja tetap mereka dianggap orang Bugis dan tahu bahasa Bugis. Anggapan mereka ini, peneliti (Makassar)